

## Kemenkumham: Idealnya Napi Terorisme Diisolasi

JAKARTA (IM) – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berharap, kedepannya narapidana kasus terorisme (teroris) dapat diisolasi atau disel terpisah dari Warga Binaan Perumahan (WBP) lainnya. Hal itu, untuk mencegah terjadinya penyebaran serta berkembangnya paham radikalisme di dalam penjara.

“Idealnya kan pelaku tipiter (tindak pidana terorisme) benar-benar diisolasi. Satu sel satu orang dan tidak bisa berinteraksi, komunikasi, atau sosialisasi dengan WBP lainnya,” ujar Kabag Humas Kemenkumham, Tubagus Erif Faturahman saat dikonfirmasi, Jumat (9/12).

Untuk diketahui, terduga pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Agus Sujatno alias Agus Muslim merupakan mantan narapidana kasus terorisme. Agus Sujatno melakukan aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar setelah setahun bebas dari Lapas Nusakambangan.

Sebelumnya, Agus Sujatno ditangkap dan diadili terkait kasus bom di Cicendo,

Kota Bandung, pada Februari 2017. Ia divonis bersalah atas kasus tindak pidana terorisme tersebut dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Ia kemudian bebas murni pada September 2021.

Namun ternyata, ia mengulangi perbuatannya. Bahkan kali ini, Agus nekat melakukan aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar. Tubagus Erif mengakui permasalahan narapidana kasus terorisme memang kompleks. Menurutnya, hukuman penjara tak menjamin pelaku terorisme terbebas.

“Dalam sistem bagaimanapun dan jenis pidana apapun (umum maupun khusus), tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang yang pernah dipenjara tidak akan mengulangi tindakannya kembali, termasuk terorisme,” ungkap Erif.

Erif mengklaim bahwa Kemenkumham telah melakukan upaya maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana. Khususnya, narapidana kasus terorisme. Kemenkumham bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan

● han

## Mendagri Lantik Muhammad Musa'ad sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian melantik Muhammad Musa'ad sebagai Penjabat (Pj) Gubernur untuk Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (9/12) di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Pelantikan Pj Gubernur Papua Barat Daya itu sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/P Tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Pj yang dilantik yakni Muhammad Musa'ad.

Tito pun membacakan sumpah janji jabatan untuk Pj Gubernur Papua Barat Daya yang diikuti Muhammad Musa'ad.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat gubernur Papua Barat Daya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD RI tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya dan berintegritas serta berbakti kepada masyarakat

Nusa dan bangsa,” kata Tito diikuti Pj Gubernur Papua Barat Daya, Jumat (9/12).

Usai pembacaan sumpah janji jabatan, dilakukan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan dan pakta integritas. Lalu, dilanjutkan pemasangan tanda pangkat penempatan tanda jabatan dan penyerahan Kepres.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian sebelumnya meresmikan Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (9/12) di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini Jumat tanggal 9 Desember 2022 bertempat di Jakarta saya Muhammad Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberikan berkat kepada kita semua amin,” kata Tito saat meresmikan Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (9/12). ● han

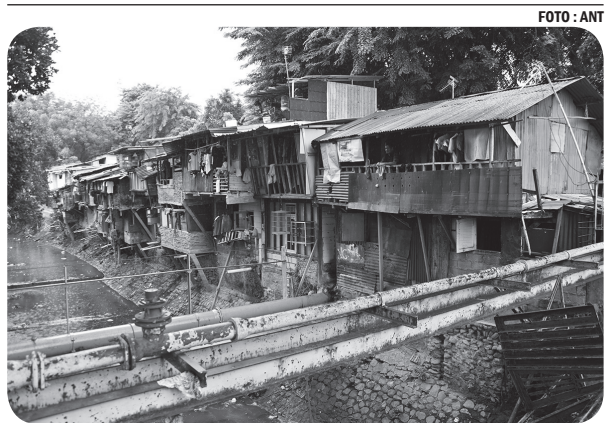


FOTO: ANI

## CAPAIAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN NASIONAL

Warga beristirahat di balkon rumahnya di permukiman bantaran kali kawasan Manggarai, Jakarta, Jumat (9/12). Pemerintah dalam paparan capaian kinerja tiga tahun Kabinet Indonesia Maju menyatakan per Maret 2022 angka kemiskinan turun menjadi 9,54 persen atau 26,16 juta orang dari sebelumnya 9,71 persen, sedangkan angka kemiskinan ekstrem per september 2022 turun 3,79 persen dari sebelumnya 4 persen.

## 14 Desember Dilakukan Pengundian Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, 14 Desember 2022 diumumkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

“Tanggal 14 Desember 2022 penetapan parpol, pengundian nomor urut parpol, dan pengumuman parpol peserta Pemilu 2024,” kata Hasyim dalam keterangan tertulis, Jumat (9/12).

Selain itu, KPU akan menerima penyerahan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh pemerintah. Selanjutnya, pada 16 Desember 2022 ada kegiatan penyerahan dukungan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada KPU provinsi.

“Desember 2022 Persiapan Pembentukan Timsel anggota KPU provinsi yang mana seleksi dimulai Januari 2023,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, terdapat sembilan partai politik parlemen yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Kesembilan partai parpol parlemen itu sudah terdapat lagi mengikuti tahapan verifikasi faktual dan akan segera ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024.

Sementara itu, saat ini sebanyak 9 parpol yang tengah verifikasi faktual sebagai calon peserta Pemilu 2024. Hasil verifikasi faktual ini akan diumumkan KPU pada 14 Desember 2022.

Sembilan parpol yang telah dilakukan verifikasi faktual adalah Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, dan Partai Gelora. ● me

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Paniai Divonis Bebas, Kejagung Didesak Banding

Dua majelis hakim dissenting opinion atas putusan vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan HAM, PN Makassar, terhadap Mayor Inf (Purn) Isak Sattu.

JAKARTA (IM) - Terdakwa kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Paniai, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu divonis bebas. Komnas HAM meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku penuntut untuk mengambil upaya hukum banding.

“Kami juga mendorong agar Jaksa Agung mengambil upaya hukum terkait putusan di PN hari ini (Kamis 8 Desember 2022),” kata Wakil

Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, Kamis (9/12).

Upaya hukum banding bisa dilakukan, terlebih dengan adanya dua majelis hakim yang memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion atas putusan vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan HAM, Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

“Kan masih ada upaya hukum banding dan kasasi. Saya kira karena ada dua ha-

kim yang dissenting opinion, kita belum tahu apakah di tingkat PT akankah ada yang mengambil keputusan sebagaimana disampaikan hakim yang mengambil dissenting opinion,” kata Haris.

Selain melakukan upaya hukum lanjutan, Haris juga meminta agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lebih proaktif kepada korban pelanggaran HAM berat dalam memberi perlindungan.

LPSK, kata Haris, juga harus lebih proaktif lagi dalam melindungi saksi-saksi pada kasus tersebut. Apalagi, Haris menilai, terdapat proses pembuktian yang tidak berjalan maksimal, lantaran partisipasi aktif dari para saksi korban dan keluarga yang kerap kali

tidak hadir di persidangan.

“Terakhir kami juga mendorong dalam perkara pelanggaran ham berat ini, sesuai dengan mandatnya agar LPSK ini lebih proaktif untuk memberikan perlindungan, memberikan hak-hak perlindungan korban pelanggaran HAM berat dan melindungi saksi-saksinya,” ucapnya.

“Yang hadir itu adalah dari aparat anggota TNI maupun Polri. Dari saksi-saksi masyarakat sipilnya yang melihat peristiwa itu tidak hadir secara langsung. Kalaupun ada itu dibacakan BAP-nya,” ujarnya.

Lebih lanjut Haris menilai bahwa proses pengusutan kasus tidak maksimal, hal itu terlihat dengan hanya Mayor Inf (Purn) Isak Sattu yang terseret dalam perkara pelanggaran HAM Berat selaku perwira penghubung dari Kodim Paniai 1705.

Pada hal, kata Haris, berdasarkan rekomendasi sebelumnya ada beberapa kom-

## IMIGRASI SETOR PNPB RP4 TRILIUN

Petugas mewawancarai seorang pemohon paspor di Kantor Imigrasi Lippo Mall Kemang, Jakarta, Jumat (9/12). Imigrasi berhasil menyektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama Januari-November 2022 sebesar Rp4 triliun atau 200 persen di atas target. Angka tersebut merupakan catatan terbesar sepanjang sejarah keimigrasian.

## Ketua MA Syarifuddin Hargai Proses Hukum yang Dilakukan KPK terhadap Dua Hakim Agung

JAKARTA (IM) - Ketua Mahkamah Agung (MA), Syarifuddin, mengatakan, menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap dua Hakim Agung, Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh.

Syarifuddin menyerahkan proses penegakan hukum terhadap kedua Hakim Agung tersebut terkait suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

“Ya kami menghargai, menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Sepenuhnya kami serahkan tindakan hukum apa yang akan dilakukan kepada KPK,” ujar Syarifuddin, saat menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia 2022 (Hakordia) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12).

“Cuma, harapan kami asas praduga tidak bersalah mohon tetap diberlakukan dan proses beracara mohon dilaksanakan dengan baik dan benar,” ujarnya.

Syarifuddin mengingatkan agar kasus Sudrajad dan Gazalba menjadi pelajaran

bagi para Hakim Agung lainnya agar tidak bermain perkara. Ia meminta agar para Hakim mematuhi pakta integritas sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 29 September 2022.

“Kita punya pakta integritas, punya pedoman kode etik dan perilaku hakim, ya patuhi dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Sebelumnya KPK telah menetapkan 13 tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Mereka yakni, dua Hakim Agung, Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh. Kemudian, dua Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti, Elly Tri Pangestu dan Prasetyo Nugroho.

Selanjutnya, Staf Gazalba Saleh, Redhy Novarisza; empat PNS MA, Desy Yustria (DY), Muhajir Habibie (MH), Nurmantu Akmal (NA), dan Albasri (AB).

Lantas, dua Pengacara, Theodorius Yosep Parera (TYP) dan Eko Suparno (ES).

Terakhir, dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam perkara ini, Sudrajad, Elly, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmantu Akmal, Gazalba, Prasetyo, dan Albasri diduga telah menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka serta Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Uang itu diserahkan Heryanto dan Ivan melalui Pengacaranya, Yosep dan Eko Suparno.

Sejumlah uang tersebut diduga terkait pengurusan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Adapun, total uang tunai yang diserahkan oleh Yosep Parera dan Eko Suparno terkait pengurusan perkara tersebut yakni sekira 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,2 miliar.

Uang tersebut kemudian dibagi-bagi kepada hakim serta pegawai MA. KPK sedang mendalami lebih detail rincian yang suap yang diterima para pegawai dan Hakim MA. ● han

## Perwira Kostrad Ngaku “Diperkosa” Mayor Paspampres Bakal Jadi Tersangka

JAKARTA (IM) – Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan perwira muda wanita Kostrad yang diduga dilakukan oknum Mayor Paspampres. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tindakan asusila yang dituduhkan kepada Mayor BF kepada Letda Ger, ternyata tidak ada unsur paksaan, tapi atas suka sama suka.

Hal tersebut diungkap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan kasus.

“Dari pemeriksaan ternyata tidak seperti laporan awal. Laporan awal kan dugaan pemerkosaan, tapi ternyata dalam berjalan pemeriksaan ada perkembangan baru yang menyatakan, atau mengindikasikan ini tidak dilakukan dengan paksaan,” kata Andika kepada wartawan, Kamis (8/12).

Awalnya perwira Paspampres berpangkat Mayor (Inf) BF telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerkosaan terhadap perempuan anggota Kostrad TNI. Ia dijerat pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun.

Namun, setelah pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan fakta terbaru bahwa tidak ada pemerkosaan, maka tidak hanya Mayor Paspampres, perempuan anggota Kostrad TNI pun terancam dipecah dan dijadikan tersangka kasus asusila.

“Nah, berarti suka sama suka dan beberapa kali kan bukan pemerkosaan. Sehingga, arahnya adalah keduanya menjadi tersangka,” kata Jenderal Andika.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Kisdianto mengatakan keduanya dijerat pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang asusila.

“Kalau hasil pemeriksaan benar keduanya akan dipecah, (dan dijerat) Pasal 281” kata Kisdianto kepada MNC Portal.

Saat ini, kata Kisdianto, perwira muda wanita Kostrad masih menjalani pemeriksaan di Komando Daerah Militer IV (Kodam IV). Sementara Mayor Paspampres telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polisi Militer Kodam Jayakarta atau (Pomdam Jaya).

“Untuk yang Kowad diperiksa di Kodam IV Hasanudin, untuk yang pria ditahan di Pomdam Jaya,” katanya. ● han



FOTO: ANI

## ANGGARAN PENDIDIKAN 2023

Dua guru kembar Sri Irianingsih (kiri) dan Sri Rosyati (kanan) memberikan materi pelajaran kepada siswa di Sekolah Darurat Kartini, Kampung Bandan, Jakarta, Jumat (8/12). Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp612 triliun lewat APBN 2023 yang akan difokuskan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM).

**PERMERAH**  
Dengan ini diberitahukan PT. ADHINUSA LESTARIJAYA, berkedudukan di Jakarta Barat, bahwa telah dilaksanakan RUPS-LE, dan telah diambil keputusan PT. ADHINUSA LESTARIJAYA, akan melakukan pengalihan dan pelepasan saham mayoritas melebihi 50% saham dalam perseroan. Bagi Pihak yang berkepentingan atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai kaitan dengan Perseroan, dapat menghubungi Kantor Administrasi Perseroan dalam kurun waktu 14 hari, (pemberitahuan ini guna memenuhi ketentuan dalam pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 2007)  
Jakarta, 10 Desember 2022  
Direksi Perseroan  
PT. ADHINUSA LESTARIJAYA

**PENGUMUMAN PEMBUBARAN**  
Dengan ini diumumkan bahwa PT. GARUDA BOMASS INDONESIA (dalam likuidasi) berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan) tidak memiliki utang kepada kreditor dan batas waktu penyampaian tagihan atau keberatan telah lewat sejak tanggal diumumkan pembubaran Perseroan kepada masyarakat dalam 1 (satu) Surat Kabar Nasional koran INTERNATIONAL MEDIA pada tanggal 05 September 2022, oleh karenanya persyaratan rincian besarnya utang Perseroan dan rencana pembayaran utang kepada kreditor tidak diperlukan dan sesuai dengan Neraca Terakhir, Perseroan tidak memiliki aset.  
Demikianlah pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Jakarta, 10 Desember 2022  
Hormat Kami  
Tim Likuidator

**PENGUMUMAN**  
Dengan akta tanggal 07/12/2022 Nomor 02 dibuat hadapan KUA JUAANTI, SH. MKn Notaris di kabupaten Karawang telah dibubarkan Perseroan Terbatas MERU AGUNG SINERGI berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.  
Kepada semua kreditor agar menghubungi kami dengan membawa bukti sah pada hari kerja jam 08.00 - 14.00 WIB, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini, setelah lewat waktu tersebut maka keberatan semua kreditor tidak akan dilayani.  
Jakarta, 10 Desember 2022  
Direksi  
PT. MERU AGUNG SINERGI